



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 804/II/2014

IV/FEBRUARI 2014



Komisi VIII Serap Aspirasi Pengungsi Gunung Kelud

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEEMPAT FEBRUARI 2014

Minggu keempat Februari 2014 berisi laporan kegiatan Rapat Paripurna 18 Februari 2014 dengan beberapa agenda, diantaranya; Pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap dua RUU, yaitu RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea, serta Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Laporan Komisi VII Hasil *Fit and Proper Test* Calon Anggota DEN (Dewan Energi Nasional) 2014-2019 dan Kegiatan AKD.

Laporan Kegiatan Rapat Paripurna

Sebelum sampai pada pokok acara, Ketua Rapat, Dr. Pramono Anung (Wakil Ketua Bidang Inbang) melaporkan adanya sembilan surat masuk yang ditujukan kepada Pimpinan DPR. Diantara nya empat surat masuk dari DPD perihal penyampaian keputusan rapat DPD, empat surat masuk dari Presiden perihal RUU tentang Administrasi Pemerintahan; RUU tentang Perubahan atas UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; perihal Permohonan Pertimbangan bagi Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara sahabat untuk RI dan pertimbangan bagi Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Negara sahabat. Satu surat dari Dewan Kelautan Indonesia perihal permintaan usulan pelimpahan RUU tentang Kelautan menjadi inisiatif Pemerintah. Surat-surat tersebut akan diproses sesuai mekanisme Dewan.

Agenda pembicaraan tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap: a. RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan b. RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Laporan Komisi III yang menangani dua RUU tersebut disampaikan beberapa hal mengenai pokok-pokok Konvensi tentang bantuan hukum timbal balik antara RI dengan Republik Korea. Diantaranya; a. Kerjasama antar kedua negara telah dilakukan penandatanganan pada 30 Maret 2002 di Seoul, Korea Selatan, dengan latar belakang berkembangnya

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang transportasi, komunikasi dan informasi yang menimbulkan berkembangnya pula tindak pidana yang bersifat lintas batas yang penanganannya memerlukan kerjasama antar negara, b. Ruang lingkup perjanjian yang meliputi bantuan apa saja yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan, otoritas pusat yang ditunjuk untuk permintaan bantuan kedua negara, dan hal-hal yang menjadi dasar penolakan terhadap permintaan bantuan.

Selain itu, terdapat pula pokok-pokok konvensi tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara RI dan Republik India, diantaranya; a. Kerjasama dua negara telah dilakukan penandatanganan pada 25 Januari 2011 di New Delhi, dengan latar belakang berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang

transportasi, komunikasi, dan informasi yang menimbulkan berkembangnya pula tindak pidana yang bersifat lintas batas yang penanganannya memerlukan kerjasama antar negara, b. Ruang lingkup perjanjian yang meliputi bantuan atau hal-hal apa saja yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan, otoritas pusat yang ditunjuk untuk permintaan bantuan kedua negara, dan hal-hal yang menjadi pengecualian dalam perjanjian ini. Komisi III telah membahas dua RUU tersebut dengan Pemerintah dan memandang penting kedua RUU ini untuk segera disahkan bagi kepentingan negara dan masyarakat umum dalam rangka memerangi tindak kejahatan atau pidana yang bersifat transnasional, yang dapat terjadi pada situasi global seperti saat ini. Komisi III memberi respon terhadap perkembangan tindak

pidana yang semakin canggih dan meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, diperlukan kerjasama internasional dalam bidang keamanan dan hukum dengan negara lain, khususnya seperti dengan Republik Korea dan Republik India, yang akan berguna pula untuk mempererat hubungan bilateral dengan kedua negara yang bersifat saling menguntungkan. Rapat Paripurna akhirnya menyetujui kedua RUU ini untuk disahkan menjadi UU.

Presiden yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri, memberikan pendapat akhir sehubungan dengan dua RUU tersebut; bahwa secara umum pengesahan perjanjian ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Indonesia terhadap usaha-usaha pemberantasan kejahatan lintas batas, termasuk korupsi. Selain itu, pengesahan perjanjian ini untuk memberikan landasan hukum yang kuat, yaitu: **Pertama**, menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan keadilan dan kebenaran. **Kedua**, mewujudkan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk itu, negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional, melakukan hubungan dan kerjasama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional. **Ketiga**, meningkatkan dan mengembangkan kerja sama yang efektif melalui perjanjian bantuan hukum timbal balik antara Republik Indonesia dengan Republik Korea dan antara Republik Indonesia dengan Republik India di bidang penegakan hukum dan **Keempat**, meningkatkan dan mengembangkan kerja sama antar aparat penegak hukum dari kedua negara untuk menyita, membekukan dan mengembalikan aset hasil kejahatan dalam konteks penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan hukuman.

Laporan Komisi VII tentang Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan

Pada tahap pelaksanaan proses uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Energi Nasional (DEN)

2014-2019, komisi VII mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No.30 tahun 2007 tentang energi; Peraturan Presiden RI No.26 tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional; Mekanisme *fit and proper test* calon anggota DEN dari pemangku kepentingan periode 2014-2019. Pemerintah menyampaikan enam belas calon anggota DEN dan selanjutnya Komisi III mensosialisasikan ke Media Massa untuk memperoleh tanggapan dari masyarakat umum. Dari enam belas calon tersebut, setelah melakukan *fit and proper test* disetujui delapan nama untuk menjadi calon anggota DEN, yaitu; (1) Dr. Ir. Tumiran, M.Eng, (2) Prof. Ir. Rinaldy Dalimi, M.Sc, PhD, (3) Ir. Achdiat Atmawinata, (4) Ir. Abadi Poernomo Dipl. Geoth .En. Tech, (5) Dr. Ir. Andang Bachtiar, M.Sc, (6) A. Sonny Keraf, Ph.D, (7) Prof. Dr. Ir. Syamsir Abduh dan (8) Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.MT. Kedelapan calon anggota tersebut disetujui menjadi calon anggota DEN pemangku kepentingan periode 2014-2019, dan selanjutnya atas persetujuan ini akan diproses lebih lanjut kepada Presiden.

Komisi VIII Serap Aspirasi Pengungsi Gunung Kelud



Tim Komisi VIII DPR dipimpin Ketua Komisi Ida Fauziyah mengunjungi Posko Bencana Gunung Kelud.

Komisi VIII DPR RI menyerap aspirasi dari masyarakat yang menjadi korban bencana Erupsi Gunung Kelud Jawa Timur, Kamis (20/2). Salah satunya keinginan mereka mendapatkan bantuan bahan material untuk perbaikan rumah yang rusak

ringan maupun rusak berat.

“Jadi mereka tidak lagi menginginkan bantuan yang selama ini hanya berupa selimut, tetapi mereka menginginkan bantuan untuk perbaikan rumahnya yang rusak,” ujar Ketua Komisi VIII Ida Fauziyah (F-PKB) yang juga Ketua Tim Kunjungan Spesifik Panitia Kerja Bantuan Siswa Miskin (Panja BSM) saat ditemui Parle di Pos Evakuasi Pengungsi Bencana Alam Gunung Kelud Kecamatan Plosoklaten, Kediri, Jawa Timur.

Dilanjutkannya, Komisi VIII sudah mendapatkan laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial terkait keinginan masyarakat korban Erupsi Gunung Kelud yang ingin memperbaiki rumahnya, baik yang rusak ringan maupun rusak berat.

Atas aspirasi tersebut, Komisi VIII minta diadakan koor-

dinas antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan BNPB agar semua dapat diinventarisir, yang kemudian nantinya akan ada *sharing* pembiayaan, baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan BNPB.

“Intinya, Komisi VIII mendorong agar setelah dilakukan inventarisir itu

segera dilakukan eksekusi dari bantuan tersebut,” ujar Fauziyah.

Ia berharap proses inventarisirnya tidak terlalu lama sehingga ketika statusnya sudah aman, warga masyarakat yang menjadi korban Erupsi Gunung Kelud bisa kembali dan memperbaiki rumahnya.

Dalam kunjungan ini, Ida juga didampingi anggota Komisi VIII antara lain Mahrus Munir, Kasma Bouty, Hummaedi, Gde Sumarjaya Linggih, Manuel Kaisiepo, Ina Ammania, Abdul Zaiz Suseno, Achmad Ruba’i, Naura Dian Hartarony, dan Soemintarsih Moentoro. (iw)/foto:ivan armanias/parle.

Standarisasi Produk Cegah Produk Berbahaya Dari Cina



Anggota Pansus RUU Standardisasi Penilaian Kesesuaian (RUU SPK) Asmin Amin saat meninjau pabrik sepatu di Batam.

Anggota Pansus RUU Standardisasi Penilaian Kesesuaian (RUU SPK) Asmin Amin mengatakan, standarisasi sangat diperlukan untuk berbagai produk seperti jasa, makanan dan lain-lain.

Menurutnya, selain membawa dampak positif, Produk RUU Standardisasi

ini juga memiliki dampak berbahaya bagi produk dalam negeri. Misalnya, industri pembuatan kapal kayu apabila mengikuti standarisasi internasional tentunya harus sesuai ketebalannya dan sebagainya. “Berdasarkan standar tentunya pembuatan kapal kayu dianggap tidak sesuai standar,” ujar

anggota dari PKS ini kepada Parlemen, di Batam, Selasa pagi, (20/2).

Dia menambahkan, melalui RUU SPK diharapkan dapat mendeteksi dan menjaga pasar Indonesia dari produk Cina yang membanjiri pasar. “Kalau tidak diproteksi dengan RUU SPK apa saja bisa masuk ke Indonesia,” tegasnya.

Asmin menilai, RUU ini merupakan produk globalisasi yang mengharuskan semua produk memiliki standar yang tinggi. Sementara yang dikhawatirkan tentunya produk dalam negeri tidak dapat memenuhi standar yang ada.

“Produk ini dibuat dalam *injury time*. Kalau kejar waktu maka akan berbahaya. Perlu adanya Pendekatan partisipatif dengan cara memanggil lembaga independen, pengusaha dan kita tanya masukannya,” ujarnya.

Berikutnya, lanjutnya, yaitu dengan pendekatan *scientist* dan kebudayaan. Terakhir yaitu pendekatan politik dagang. “Pendekatan politik dagang mengarah kepada diplomasi sekitar Asean,” katanya. (si)

Komisi I Ratifikasi RUU Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir

Komisi I DPR RI sepakat meratifikasi Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir PBB tahun 2005 (*International Convention For the Suppression of Act of Nuclear Terorisme United Nation 2005*). Langkah ini dipandang perlu untuk membangun kerja sama Internasional

dalam menhadang aksi terorisme nuklir demi terciptanya dunia yang aman.

“UU tentang Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir mutlak diperlukan sebagai upaya menangkal dan menghindarkan negara dan masyarakat



dari ancaman terorisme nuklir yang berskala nasional maupun internasional. Ini demi terciptanya tatanan dunia yang aman, adil, dan makmur,” kata M. Basri Sidehabi saat menyampaikan pandangan Fraksi Partai Golkar, di Gedung DPR, Rabu (19/2).

Sementara itu, anggota Komisi I dari FPD Nany Sulistiyani Herawati mengatakan tindakan terorisme nuklir dapat menimbulkan konsekuensi terparah dan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Kejahatan terorisme, lanjutnya merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi Internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Kejahatan terjadi di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang dan telah memakan korban tanpa pandang bulu.

Catatan disampaikan anggota Komisi I dari FPKS Budi-yanto sebelum menyampaikan persetujuannya untuk meratifikasi RUU ini. “Jangan sampai ratifikasi ini menjadi penghambat pemanfaatan nuklir ‘damai’ di Indonesia, misalnya di bidang kesehatan, iptek, industri, pengelolaan sumber daya alam, dan energi,” paparnya.

Pemerintah menurutnya, harus dapat melihat dan memahami apa keuntungan yang didapat serta konsekuensi yang harus dijalankan dari ratifikasi konvensi tersebut. Persetujuan terhadap RUU jangan sampai menghambat



Pimpinan Komisi I DPR saat rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

transportasi zat radioaktif yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan sejumlah industri di tanah air.

Dalam rapat yang dihadiri Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mewakili presiden, seluruh fraksi akhirnya sepakat untuk meratifikasi konvensi internasional ini. Pimpinan sidang Wakil Ketua Komisi I Agus Gumiwang Kartasmita mengetokkan palu dan menyatakan pengesahan tingkat II RUU akan dilakukan dalam rapat paripurna terdekat. (spy) foto:iw/parle/andri.

Komisi VIII Minta Kepastian Kehalalan Vaksin Jemaah Haji



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Mahrus Munir.

Komisi VIII DPR RI minta kepastian vaksin yang diberikan kepada jemaah haji Indonesia bebas dari unsur haram. Hal tersebut mengemuka saat rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Wakil Menteri Kesehatan, Ali Gufron Mukti, Rabu (19/2).

“Kami ingin memastikan bahwa

vaksin yang diberikan kepada jemaah haji Indonesia ini halal. Palsunya, sempat beredar kabar bahwa vaksin yang diberikan untuk menjaga stamina jemaah haji Indonesia di tanah suci, terutama vaksin meningitis itu mengandung unsur babi,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Mahrus Munir usai memimpin rapat.

Menjawab pertanyaan itu, Wakil Menteri Kesehatan, Ali Gufron Mukti mengatakan bahwa saat ini memang belum ada Undang-undang yang khusus mengatur tentang produk halal yang kini masih dalam pembahasan di DPR (Jaminan Produk Halal). Termasuk hal tidak adanya kewajiban akan produk vaksin dan obat untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Meski demikian untuk menjamin kehalalan kepada jemaah haji, tidak sedikit produk vaksin atau obat yang meminta uji coba dan sertifikasi halal dari MUI.

“Meski begitu, kami memastikan bahwa vaksin yang digunakan petugas kesehatan untuk jemaah haji Indonesia adalah halal. Walaupun kami akui ada juga yang belum halal, namun hal itu tidak kami berikan,” jelas Ali Gufron.

Ditambahkannya, saat ini vaksin yang diberikan untuk jemaah haji Indonesia berasal dari Perancis, Cina dan Amerika Serikat. Namun, ia memastikan yang diberikan kepada jemaah haji Indonesia merupakan vaksin yang sudah mendapat sertifikasi halal dari MUI. Sehingga para jemaah haji tidak perlu khawatir mendapatkan vaksin tersebut.

“Saya menyarankan jangan hanya vaksin untuk jemaah haji Indonesia saja yang halal, namun saya berharap agar semua vaksin dan obat yang diberikan untuk masyarakat Indonesia juga harus mendapat uji coba dan sertifikat halal,” harap anggota Komisi VIII, M. Busro. (Ayu)foto:iw/parle/andri.

Komisi III Libatkan Tim Pakar dalam Pemilihan Hakim Konstitusi

Komisi III DPR RI akan membentuk Tim Pakar yang dilibatkan dalam proses uji kepatutan dan kelayakan calon Hakim Mahkamah Konstitusi. Tim ini merupakan gabungan pakar dari perguruan tinggi, tokoh masyarakat yang dinilai kredibel dan memiliki sifat kenegaraan.

“Kita ingin *fit and proper test* ini mendapat legitimasi publik, maka kita libatkan orang-orang yang bisa dipercaya kredibilitasnya. Ada cendekiawan, akademisi, semuanya pakar dan tokoh besar dibidangnya dan bukan orang DPR. Mereka yang dianggap sudah menjadi negarawan dan tidak berurusan lagi dengan politik praktis, seperti calon presiden dan sebagainya,” kata Wakil Ketua Komisi III Al Muzammil Yusuf di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/2/14).

Ia menambahkan sejumlah nama pakar sudah diusulkan dalam rapat internal komisi namun baru disampaikan ke publik setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. Diharapkan minggu depan tim ini sudah dapat

ditetapkan dan langsung bekerja seiring berakhirnya masa pendaftaran calon 27 Februari nanti.

“Tim seleksi ini pekan depan sudah bisa kita umumkan kepada publik dan langsung bekerja. Kita jadwalkan sebelum masa reses 6 Maret nanti kita sudah mendapatkan 2 Hakim MK yang akan mewakili DPR,” lanjut politisi dari FPKS ini. Hakim terpilih akan menggantikan M. Akil Mochtar yang mengundurkan diri dan Harjono yang memasuki masa pensiun Maret 2014.

Anggota Komisi III dari FPAN Taslim menyambut langkah untuk melibatkan pakar dan tokoh masyarakat sebagai bentuk transparansi sehingga pandangan publik, DPR akan mengistimewakan orang partai dapat diluruskan. “Kebijakan ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Tim seleksi ini akan menghindari proses yang sebelumnya dianggap mengistimewakan calon dari partai politik,” jelasnya.

Taslim sendiri mengusulkan sejumlah nama calon anggota tim danta-



Wakil Ketua Komisi III DPR Al Muzammil Yusuf.

ranya Adnan Buyung Nasution, Buya Syafii Maarif, Jafar Bajaber. Nama lain yang mengemuka diantaranya Laica Marzuki mantan Hakim MK dan Bagir Manan mantan Hakim Agung.

Seperti diketahui, pasca dibatalkannya UU Penyelamatan MK maka proses pemilihan calon Hakim Mahkamah Konstitusi kembali berdasarkan UU yang lama. Itu berarti anggota partai politik berhak mencalonkan diri tanpa ada jeda waktu pengunduran diri dari partai. Tercatat dua anggota DPR sudah menyatakan siap mencalonkan diri yaitu Benny K. Harman (FPD) dan Ahmad Yani (FPPP). (iky) foto: hr/parle/andri.

DPR Minta Petugas Lapangan Keluarga Berencana Diperkuat

Komisi IX DPR RI minta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) untuk memperkuat keberadaan dan fungsi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di daerah untuk mensukseskan program-program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) serta pembangunan keluarga menuju pembangunan keluarga yang berkualitas.

Hal tersebut merupakan salah satu Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan Kepala BKKBN Fasli Jalal yang dibacakan pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi IX, Supriyatno



Wakil Ketua Komisi IX DPR Supriyatno.

di Ruang Rapat Komisi IX Gedung DPR, Rabu (19/2)

Komisi IX juga minta BKKBN dalam setiap program dan kegiatannya memperhatikan aspek pembangunan yang berwawasan kependudukan sehingga bonus demografi bisa dijadikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas penduduk.

“Dalam menyusun dan merencanakan program dan kegiatan ke depan sampai pada tingkat pedesaan, BKKBN diminta memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa,” kata Politisi Partai Gerindra ini.

Selain itu, kata Supriyatno, Komisi IX minta BKKBN untuk mengutamakan kompetensi dalam menyelesaikan permasalahan jabatan yang masih kosong baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama Kepala BKKBN, Fasli Jalal

menyatakan saat ini jumlah SDM/Tenaga Lini Lapangan 22.481 orang, terdiri dari Penyuluh KB 13.790 orang, PLKB PNS 3.414 orang dan PLKB Non PNS 5.277 orang.

“Jika dibandingkan dengan jumlah Desa/Kelurahan 79.418, maka rasio PLKB terhadap Desa/Kelurahan binaan sebesar 3,53. Artinya 1 PLKB membina antara 3-4 Desa/Kelurahan,” papar Fasli. Untuk mendapatkan rasio yang

ideal, menurut Fasli, minimal 1 PLKB membina 2 Desa/Kelurahan. Maka untuk mencapai kondisi tersebut dibutuhkan kurang lebih 17.228 PLKB.

Dijelaskan Fasli, bahwa kondisi PLKB dalam pelaksanaan program kependudukan merupakan unsur yang sangat strategis. Keberadaan PLKB di lapangan merupakan tenaga penggerak dan dinamisor program. (sc) foto:iv/parle/odjie.

RUU SPK Tingkatkan Daya Saing Produk Dalam Negeri



Tim Pansus RUU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berkunjung ke Batam.

DPR bersama dengan Pemerintah saat ini sedang membahas Rancangan Undang-Undang RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (RUU SPK), RUU ini sangat dibutuhkan guna meningkatkan efisiensi dan daya saing produk serta perekonomian Nasional.

“Standardisasi memang sangat dibutuhkan karena saat ini kita mulai masuk ke era globalisasi, dengan ini industri kita diharapkan dapat bersaing dengan negara lain untuk masuk ke dalam pasar global,” ujar anggota DPR I Wayan Gunastra dari Partai Demokrat, saat meninjau BP Batam, baru-baru ini.

Menurutnya, RUU SPK diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia dengan negara lain agar dapat diterima di pasar global. “UU ini memang tidak detail, namun kita tidak perlu khawatir dapat mempersempit bangsa kita,” ujarnya.

Nantinya, lanjut Wayan, RUU SPK juga dapat meningkatkan industri dibidang jasa. seperti misalnya Jasa TKI dimana penyedia jasa juga harus memenuhi standar dan persyaratan seperti sertifikasi buat jasa tertentu. “Kalau kita tidak siap dengan standar sertifikasi tentunya jasa maupun produk kita tidak akan laku, dan melalui cara ini dapat memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen dan produsen,” katanya. (si)

Pencabutan Moratorium TKI Perlu Persetujuan DPR

DPR RI menilai pemerintah tidak sensitif apabila mencabut kebijakan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi karena sejumlah permasalahan masih membelenggu para pejuang devisa ini. Selama moratorium diterapkan, tercatat 41 Pekerja Rumah Tangga migran terancam hukuman mati serta beberapa daftar kasus kekerasan lain yang belum jelas proses hukumnya.

“Kita melihat ini ada upaya dari pemerintah untuk mencabut moratorium yang telah disepakati antara pemerintah Indonesia dengan DPR. DPR diminta untuk menolak moratorium itu untuk dicabut. Untuk itu, Pimpinan DPR akan segera menindaklanjuti hal ini. Jika memang ada pencabutan moratorium, Pemerintah perlu berkomunikasi dengan DPR,”



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung didampingi anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka menerima delegasi Migrant Care.

kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, usai menerima LSM Migrant Care dan delegasi TKI, di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/02).

Wakil Ketua DPR bidang Korinbang ini berjanji akan segera menyurati Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala BNP2TKI untuk meminta kejelasan mengenai rencana pencabutan kebijakan moratorium ini.

Dalam kesempatan itu ia juga menyampaikan rasa prihatin mendengar perkembangan kasus hukum Satinah, TKI asal Semarang yang terancam akan dieksekusi mati pada 3 April nanti, jika tidak membayar diyat atau denda sebesar Rp 21 miliar. Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur ini mengapresiasi langkah *Migrant Care* untuk mencari dana penyelamatan Satinah.

“Soal hukuman kepada Satinah, Indonesia harus membayar denda atau diyat sekitar Rp 21 miliar, dan sepertinya Pemerintah tidak memiliki dana, maka *Migrant Care* melakukan gerakan untuk membantu Satinah. Kalau dia (Satinah) tidak ditolong, maka akan dipancung. Semoga gerakan ini akan diikuti oleh seluruh masyarakat, dalam rangka menyelamatkan saudari Satinah,” jelas Pram, sapaan akrab Pramono.

Lebih jauh ia mengkritisi permasalahan TKI ini belum

mendapat perhatian sepenuhnya dari pemerintah. Menurutnya perlu perubahan sistem dalam penanganan TKI. “Pemerintah kita selalu teragap-gagap kalau ada persoalan TKI, misalnya ketika TKI mau dihukum. Harus ada perubahan sistem dalam pengaturan terhadap TKI. Jangan TKI ini hanya dibutuhkan untuk kepentingan bisnis atau hal yang hanya untuk keuntungan negara. Termasuk gerakan-mencabut moratorium itu, tidak lepas dari bisnis perorangan atau kelompok yang diuntungkan dengan dicabutnya moratorium itu,” tandasnya.

Sementara itu anggota Komisi IX Rieke Diah Pitaloka yang ikut mendampingi dalam pertemuan tersebut menggaris-bawahi turunnya anggaran perlindungan TKI. Pada tahun 2014 dianggarkan Rp 99,3 miliar lebih rendah dibandingkan tahun 2013 lalu yaitu Rp 124,3 miliar.

“Penurunan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat sebanyak Rp 24 miliar ini adalah jumlah yang cukup besar. Pemerintah Indonesia sudah seharusnya agresif melakukan negosiasi untuk membuat perjanjian tertulis, yang harus berisi perlindungan kepada TKI,” tegas Politisi PDI Perjuangan ini.

Dalam kesempatan ini, turut hadir menyampaikan aspirasi lin, saudara Satinah. Ia berharap DPR bisa membantu saudaranya segera bebas dari hukum dan dipulangkan ke tanah air. (sf)foto:hr/parle/odjie.

Terbuka Peluang Rumania Membuka Kerja Sama Teknologi

Rumania termasuk negara di Eropa Timur yang penguasaan teknologinya sangat bagus. Indonesia berharap mendapat alih teknologi dari Rumania untuk membuka kerja sama di bidang pertanian, kereta api, dan perkapalan.

Demikian mengemuka saat Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Rumania untuk Indonesia Valerica Epure di ruang kerjanya, Rabu (19/2). Marzuki mengatakan, banyak peluang bagi Rumania untuk melakukan kerja sama perdagangan dan investasi di Indonesia. Bidang transportasi dan pertanian, diakui Marzuki, sangat membutuhkan alih teknologi.

“Mereka banyak pengalaman, banyak perusahaan-perusahaan yang punya teknologi bagus, baik dalam bidang perkapalan, kereta api, dan pertanian. Itulah ke depan yang dapat dimanfaatkan untuk membangun hubungan yang lebih baik dan me-



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menerima Duta Besar Rumania untuk Indonesia Valerica Epure.

nguntungkan bagi kedua negara,” ungkap Marzuki usai pertemuan.

Dalam pertemuan tersebut Dubes Rumania Valerica berharap, ada kerja sama yang terus terjalin baik di tingkat pemerintah maupun parlemen. Selama ini hubungan bilateral kedua nega-

ra sangat baik. Marzuki juga selalu berharap agar hubungan kedua negara bisa saling menguntungkan. “Negara mana pun yang siap bekerja sama dengan Indonesia asal bisa memberi keuntungan bagi masyarakat Indonesia, maka kita siap bekerja sama,” ujar Marzuki. (mh)foto:iw/parle/odjie.

Komisi III Perhatikan Keberatan KPK Terkait Pembahasan RUU KUHP-KUHAP

Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap surat permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar pembahasan RUU KUHP dan KUHP dihentikan. Dalam rapat Panja RUU KUHP, Pimpinan Sidang Al Muzammil Yusuf memberikan kesempatan kepada seluruh fraksi memberikan tanggapan terhadap surat tersebut.

“Saya melihat surat ini ada dimeja saya siang ini pukul 13.00 WIB, jadi ditujukan kepada Presiden SBY ditembuskan kepada 6 pihak termasuk kepada DPR. Kita perlu menanggapi perkembangan ini sebelum memulai rapat,” kata Muzammil yang juga Wakil Ketua Komisi III, di Gedung DPR, Rabu (19/2).

Anggota Komisi III dari FP Demokrat Harry Witjaksono mengatakan surat keberatan dari KPK tersebut tidak ada pengaruhnya karena yang terlibat dalam pembahasan adalah pemerintah bersama DPR. “Jadi selama pemerintah masih ada disini, kita lanjutkan pembahasannya,” katanya.

Sementara itu anggota Komisi III dari FP Gerindra Desmon J. Mahesa mengingatkan surat KPK tersebut ditujukan kepada presiden sehingga bisa saja mempengaruhi pemerintah dan

memutuskan menarik pembahasan kedua UU ini. “Jadi kita tunggu saja bagaimana pemerintah menjawab surat KPK tersebut. Kita ingin sinyal yang pasti agar pertemuan kita tidak mubazir,” ujarnya.

Anggota Komisi III dari FPG Nudirman Munir mengingatkan kondisi yang berkembang sekarang adalah akibat pemberitaan media yang mengekspos beberapa pasal dalam RUU KUHP dan KUHP melemahkan KPK. Pandangan tersebut menurutnya tidak benar dan bisa jadi dilontarkan oleh pihak-pihak yang tidak senang proses pembahasan RUU ini berlangsung.

“Dalam banyak kesempatan kita sudah tegaskan KPK itu adalah *lex specialis*, jadi tidak ada upaya melemahkan KPK dengan pembahasan ini. Yang lebih berbahaya adalah apabila pembahasan RUU KUHP/KUHP yang merupakan warisan penjajah Belanda ini tertunda karena ada pihak yang diuntungkan dengan KUHP yang ada sekarang,” tandas mantan Ketua Dewan Mahasiswa UI ini.

Sementara itu dalam penjelasannya mewakili pemerintah Dirjen HAM Kemenkumham Harkristuti Harkrisnowo mengatakan tidak benar informasi



Wakil Ketua Komisi III DPR Al Muzammil Yusuf.

yang berkembang KPK tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RUU KUHP dan KUHP. Ia menyebut naskah RUU ini sudah dibahas Tim Penyusun yang dibentuk pemerintah sejak lama. Dalam prosesnya mantan Ketua KPK periode lalu Taufikurrahman Ruki sering memberikan masukan.

“Mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu sejarah ya. Benar Polisi, Jaksa dan KPK adalah bagian dari *stake holder* RUU ini, pasti kita libatkan. Kemudian kalau ditanya kenapa KPK tidak masuk dalam tim yang membahas RUU bersama DPR, karena tim ini adalah pemerintah bukan tim *stake holder*,” demikian Harkristuti. (iky) foto:andri/parle/od

Tiga Pengurus Dharma Wanita Kunjungi DPR

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal DPR RI yang tergabung dalam kelompok III yang terdiri dari 12 Kementerian dan Lembaga, Selasa (18/2) menerima kunjungan panitia silaturahmi DWP Pusat, DWP IPP (Instansi Pemerintah Pusat), dan DWP Propinsi DKI Jakarta.

“Ini merupakan pertemuan kedua kalinya, setelah sebelumnya DWP Kementerian Pekerjaan Umum yang menjadi tuan rumahnya. Namun, untuk DWP Setjen DPR ini merupakan pertama kalinya menerima kunjungan teman-teman dari DWP Pusat, DWP IPP dan



Ketua DWP Setjen DPR RI, Titik Djuned.

DWP Propinsi DKI Jakarta,” jelas Ketua DWP Setjen DPR RI, Titik Djuned.

Ditambahkan Titik, tujuan diadakannya rapat ini tidak lain adalah untuk membahas persiapan acara silaturahmi yang rencananya akan digelar pada 21 Mei 2014 mendatang. Dalam acara tersebut juga akan digelar serangkaian acara lainnya, diantaranya pameran dan *bazaar* produk-produk unggulan masing-masing DWP, fashion show dan acara hiburan yang akan menampilkan kebolehan masing-masing anggota, seperti permainan alat musik tradisional angklung dan

kolintang oleh DWP Pekerjaan Umum, serta paduan suara gabungan anggota Dharma Wanita Persatuan.

Tidak hanya itu, dalam kesempatan tersebut juga akan digelar seminar yang akan menampilkan pembicara yang merupakan pakar atau ahli dibidangnya. Direncanakan seminar tersebut mengangkat peran Dharma Wanita

Persatuan sebagai penggerak perubahan. Dengan kata lain, melalui organisasi *non profit* Dharma Wanita Persatuan ini diharapkan akan membawa dampak atau manfaat tidak hanya bagi para anggotanya, namun juga perubahan yang positif untuk masyarakat umum serta bangsa dan Negara.

Bahkan dikatakan pendamping dari

Dharma Wanita Persatuan Pusat, Isye Puspo, sejauh ini DWP juga ikut berperan dalam kegiatan-kegiatan sosial. Diantaranya pemberian dan penyaluran bantuan bagi daerah yang terkena bencana, seperti bantuan untuk masyarakat sekitar Gunung Sinabung, bantuan untuk korban banjir yang melanda Jakarta beberapa waktu lalu.

(Ayu) foto: rizka/parle.

Labora Sitorus Divonis Ringan, Banding Jaksa Diapresiasi

Anggota Komisi III DPR RI Harry Witjaksono memberikan apresiasi kepada Kejaksaan atas upaya banding yang dilakukan menyikapi vonis ringan 2 tahun penjara kepada oknum polisi pemilik rekening gendut Rp.1,5 triliun Aiptu Labora Sitorus. Ia meminta dilakukan eksaminasi kenapa hakim memutuskan jauh sekali dari tuntutan jaksa 15 tahun penjara.

“Saya sampaikan apresiasi, keajaiban melakukan banding atas vonis majelis hakim terhadap kasus Labora Sitorus anggota Polres Sorong. Kenapa bisa putusan hakim *drop* jauh sekali, sejauh mana upaya jaksa dalam menangani kasus ini,” katanya dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/14).

Ia memberikan contoh kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan petinggi polisi DS, diputuskan majelis hakim 18 tahun penjara. “Perlu dievaluasi juga bagaimana



Anggota Komisi III DPR Harry Witjaksono.

pemahaman para hakim terutama di daerah terhadap aturan perundang-undangan yang mengatur TPPU ini,” lanjutnya pada kesempatan berbeda.

Dalam raker tersebut anggota Komisi III dari FPDIP Eva Kusuma Sundari juga mempertanyakan tindak lanjut sejumlah kasus HAM seperti korban G30S PKI, kasus tahun 1976 dan kasus 1980. Menurutnya rangkaian kasus ini merupakan tanggung jawab negara yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

“Saya sudah mengimbau presiden membuat Kepres rehabilitasi tapi tidak

disahut, penyelesaian politik tidak mau, penyelesaian hukum juga tidak bergerak, jadi apa itu penyelesaian bagi kasus HAM di negeri ini. Mereka tidak minta kompensasi kok. Ada tanggung jawab negara untuk menyelesaikan kasus HAM dalam hal ini Jaksa Agung,” paparnya.

Menjawab hal ini Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan terdakwa Labora Sitorus hanya divonis bersalah pada kasus pembalakan hutan dan penyeludupan BBM. “Jaksa sudah melakukan upaya maksimal kumulatif 3 dakwaan tetapi menurut hakim kasus TPPU tidak terbukti, jadi vonis akhirnya terjun bebas. Saya putuskan kita harus banding,” tekannya.

Terkait kasus pelanggaran HAM berat, aparat kejaksaan menurutnya masih terus melakukan pembicaraan dengan Komnas HAM tentang langkah yang dapat diambil berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. (iky) foto: iw/parle/andri.

Komisi IV Selesaikan Naskah RUU tentang Perkebunan

Komisi IV DPR RI telah menyelesaikan naskah Rancangan Undang-Undang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, selanjutnya akan dilakukan harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI dan diajukan kepada Rapat Paripurna menjadi usul inisiatif DPR.

Sejak awal sudah RUU ditentukan sebagai Program Legislasi nasional

(Prolegnas) 2009-2014, dan pada tahun lalu ditetapkan menjadi Prolegnas 2014. “Sekarang tinggal memasuki tahap penyelesaian perubahan undang-undang ini menjadi inisiatif DPR dikirim kepada Presiden RI dan Presiden akan mengembalikan Daftar Inventaris Masalah (DIM) berikut Ampres dan menunjuk Mitra Kerja pembahasan atas RUU ini,” kata Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron, se usai rapat

Komisi IV menerima Laporan Panitia Kerja (Panja) Pembentukan RUU tentang Perkebunan. Selasa (18/2) di Gedung Parlemen, Senayan.

Menurut Herman Khaeron, RUU ini akan mengatur penyelesaian konflik lahan, menghormati hak-hak masyarakat hukum adat, pembatasan terhadap kepemilikan pelaku usaha perkebunan maksimum 100 ribu ha.

“Dari setiap Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki harus dilaksanakan 3 tahun minimal 30% dan maksimum dalam 6 tahun harus sudah dilaksanakan keseluruhannya kalau tidak harus dikembalikan kepada negara,” paparnya.

Kemudian juga mengatur pembatasan investasi asing 30%, karena biasanya sampai sekarang perkebunan dikuasai asing. Selanjutnya yang menjadi pasal-pasal alfirmatif kita memberikan minimal 20% untuk masyarakat di sekitar perkebunan agar menjadi bagian usaha perkebunan. “Ada batasan investasi maksimum 30% karena kita ingin seluruh hajat hidup masyarakat ini dikelola oleh negara dan kembali bisa memberikan kemakmuran pada rakyatnya,” tegasnya.



Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron.

Lebih lanjut Herman mengatakan untuk industri strategis ada batasan bahwa bagi para pendiri industri olahan perkebunan tertentu yang berbasis terhadap komoditas impor wajib membangun pabriknya maksimum dalam 3 tahun sudah ada perkebunannya,

seperti mereka membangun pabrik gula yang berbasis gula rafinasi maka dalam 3 tahun mereka harus membangun perkebunan tebu untuk menunjang terhadap industrinya tersebut.

Pada akhirnya, tujuan RUU atas Perubahan UU tentang Perkebunan untuk menjawab semua tantangan yang ada di bidang perkebunan, misalnya kepemilikan perkebunan yang tidak terkendali, masalah lingkungan.

“Dalam RUU Perkebunan ini diatur bagi pelaku usaha atau pekebun yang membakar lahan perkebunannya akan mendapatkan hukuman, selain denda yang menjadi bagian dari sanksi, ada denda administrasi dan pidana,” ungkap Herman Khaeron. (as) foto:iw/parle/odjie.

DPR Pertanyakan Dikurangnya Anggaran Perlindungan TKI



Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka.

Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan anggaran perlindungan WNI di luar negeri khususnya anggaran perlindungan TKI

di luar negeri termasuk biaya advokasi.

Pertanyaan tersebut, disampaikan Rieke langsung kepada Menteri Luar Negeri, Martin Natalegawa saat Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/2)

“Mumpung ada Menteri Luar Negeri, kami dari Komisi IX terkait dengan perlindungan tenaga kerja di luar negeri. Mengapa anggaran WNI di luar negeri dikurangi, khususnya perlindungan TKI termasuk biaya advokasinya di negara-negara yang menjadi tujuan TKI yang sekarang diidentifikasi memiliki masalah yang besar baik itu

masalah vonis mati maupun masalah deportasi seperti di Saudi dan Malaysia”, papar politisi F-PDIP.

“Kami ingin mempertanyakan mengapa anggaran perlindungannya dikurangi. Jelas tidak cukup, yang ada saja tidak cukup apalagi dikurangi,” tegas Rieke lagi.

Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung yang memimpin Rapat Paripurna DPR tersebut, menyatakan bahwa pertanyaan yang disampaikan Rieke sudah didengar langsung oleh Menteri Luar Negeri dan untuk menjadi perhatian. (sc) foto:iw/parle/odjie.

Dewan Tetapkan Delapan Anggota Dewan Energi Nasional

Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (18/2) dipimpin Wakil Ketua DPR, Pramono Anung menetapkan 8 (Delapan) Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2014-2019.

Kedelapan anggota DEN periode 2014-2019 yaitu: Tumiran dan Rinaldy Dalimi, masing-masing dari kalangan Akademisi, Achdiat Atmawinata

dan Abadi Poernomo dari kalangan Industri, Andang Bachtiar dari kalangan Teknologi, A. Sonny Keraf dari Lingkungan Hidup, Syamsir Abduh dan Dwi Hary Soeryadi dari kalangan Konsumen.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VII DPR RI, Sutan Bhatogana menyampaikan laporan Hasil

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota DEN periode 2014-2019 yang telah dilaksanakan Komisi VII.

Menurut Sutan, sebelum kegiatan Uji Kelayakan dan Kepatutan dilaksanakan, Komisi VII terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari Pemerintah mengenai pelaksanaan kegiatan penyaringan yang telah di-



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung foto bersama Anggota Dewan Energi Nasional terpilih.

lakukan. Pemerintah serta penetapan sejumlah 16 (Enam Belas) nama Calon Anggota DEN Periode 2014-2019. Dan 16 nama Calon DEN tersebut telah

dimuat di beberapa media massa untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat umum.

Lebih lanjut disampaikan Sutan, dari hasil Uji Kelayakan dan Kepatutanyang dilakukan Komisi VII DPR RI dan pemilihan Calon Anggota DEN Periode 2014-2019 melalui mekanisme pemungutan suara, Komisi VII telah menetapkan 8 (Delapan) Calon Anggota DEN Periode 2014-2019.

“Demikian laporan Komisi VII DPR RI mengenai hasil pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan Periode 2014-2019, dengan harapan mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini, untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden RI guna mendapatkan penetapan sebagai Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan Periode 2014-2019,” kata Sutan. (sc) foto:hr/parle/odjie.

Pemerintah Diminta Cabut Larangan Penggunaan BBM Subsidi Bagi Nelayan



Anggota DPR dari F-PDIP, Rieke Diah Pitaloka.

Anggota DPR RI dari F-PDIP, Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah mencabut larangan penggunaan BBM Subsidi bagi nelayan. Pasalnya kondisi nelayan kita dalam keadaan sulit baik akibat cuaca, serbuan ribuan ikan impor maupun bencana alam.

Hal tersebut disampaikan Rieke saat Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (18/2) dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Pramono

Anung, di Gedung DPR RI, Jakarta.

Diinformasikan Rieke, bahwa pada 27 Januari 2014 lalu, BPH Migas telah mengeluarkan surat untuk mencabut Subsidi BBM bagi para nelayan. Dengan alasan, nelayan dengan kapal 30 GT harus menggunakan solar industri. Sebagaimana diketahui solar subsidi harganya Rp 5.500,-/liter, sementara solar industri antara Rp 11.000,-/liter bahkan bisa mendekati Rp 13.000,-/liter.

“Kita semua tahu, bahwa kondisi nelayan sedang dalam keadaan sulit. Cuaca yang tidak menentu, disamping itu serbuan ribuan ikan impor yang luar biasa serta bencana alam yang hadir di pemukiman atau perkampungan nelayan telah mempersulit keadaan ekonomi mereka,” papar Anggota Komisi IX tersebut.

Menurut Rieke, kapal dengan 30 GT itu sesungguhnya tidak semuanya dimiliki pemodal besar. Kata Rieke, BPH Migas perlu mengoreksi aturannya, karena kapal nelayan yang dimiliki pemodal besar itu sesungguhnya kapal 100 GT dimana biasanya milik

perusahaan perikanan.

Namun, untuk kapal dibawah 100 GT adalah milik perorangan, dan itu merupakan usaha patungan antara pengusaha dengan modal yang tidak terlalu besar dengan nelayan disekitarnya, bahkan sebagian adalah milik koperasi nelayan.

Lebih lanjut diinformasikan Rieke, pada 5 Februari 2014, nelayan telah melakukan aksi ke Istana Merdeka dan Kementerian ESDM dimana kemudian dicapai kesepakatan yang mencabut peraturan tersebut dan ditandatangani oleh empat instansi terkait.

Namun kenyataannya hingga hari ini, para nelayan itu “masih” dipaksa menggunakan solar yang tidak bersubsidi, padahal modal untuk BBM itu bisa mencapai 60% dari kebutuhan melaut, dan jika menggunakan solar industri ada peningkatan hingga 85%-90% cost.

“Oleh karena hal itu, mereka melakukan aksi di Indramayu dan terjadi bentrokan ketika mereka melakukan aksi ke Pertamina Balongan. 10 orang terluka bahkan ada yang bocor ke-

palanya dan 13 orang hingga pagi ini masih ditahan Mapolres Indramayu,” papar Rieke.

“Oleh karena itu, saya mengharapkan dengan segala kerendahan hati memohon bantuan kepada rekan-

rekan terkait baik itu di Komisi VII maupun Komisi yang lain meminta agar Pemerintah segera mencabut larangan digunakannya BBM Bersubsidi bagi nelayan sebagaimana kesepakatan 5 Februari 2014,” tambahnya.

Selain itu, Rieke minta aparat Kepolisian menghentikan sikap represif kepada nelayan dan membebaskan 13 nelayan yang masih di tahan. (sc) foto: andri/parle/iw.

Ancaman Letusan Gunung Kerinci Harus Buka Jalur Evakuasi

Gunung Kerinci akan mengancam masyarakat Jambi bila suatu saat meletus. Masyarakat yang tinggal di kawasan Kerinci, tepat di kaki gunung, bisa terisolir karena tidak ada jalan evakuasi untuk menyelamatkan diri hingga kini. Lewat pertemuan konsultasi yang dipimpin Ketua DPR, jalan evakuasi itu pun disepakati.

Di kawasan Kerinci hampir tak ada jalur untuk mengevakuasi warga di kaki gunung, kecuali harus membuka jalan di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang dikuasai Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Pemrov Jambi, Pemkab Kerinci, dan masyarakat Kerinci sendiri sudah bertahun-tahun mengusulkan kepada pemerintah dan DPR agar diberi ruang untuk membangun infrastruktur jalan di TNKS, namun belum ditanggapi. Sementara ancaman letusan Gunung Kerinci terus mengintai.

Ketua DPR RI Marzuki Alie yang memimpin pertemuan rapat konsultasi

di ruang BAKN DPR, Senin (17/2), menyepakati bahwa fungsi TNKS harus dirubah dahulu menjadi hutan lindung agar di lokasi tersebut bisa dibangun jalan evakuasi. Selama ini yang menghambat Pemda untuk membangun jalan evakuasi adalah fungsi TNKS yang tidak boleh disentuh pembangunan jalan.

Rapat dihadiri Wakil Gubernur Jambi, Bupati Kerinci, BNPB, Kemenhut, Komisi IV, Komisi VIII, Aliansi Rakyat Kerinci Bersatu, dan Masyarakat Peduli Kerinci. Kemenhut yang diwakili Dirjen Perlindungan Hutan Konservasi Alam yang selama ini tak berani membuka TNKS, karena takut melanggar hukum, akhirnya mau juga mengizinkan membuka areal tersebut asal ada usulan perubahan fungsi hutan.

Sebelumnya Ketua DPR Marzuki Alie telah mendesak Kemenhut untuk lebih peduli dan mementingkan keselamatan hidup masyarakat di sekitar gunung Kerinci. “Aturan ini, kan, bukan



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

kitab suci. Jadi bisa kita rubah untuk menyelamatkan masyarakat,” tegas Marzuki saat memimpin rapat. Usulan membukakan jalan evakuasi ini disambut baik masyarakat Kerinci yang hadir termasuk Wakil Gubernur Jambi dan Bupati Kerinci. Ini solusi yang cepat dan tegas dari Ketua DPR RI. (mh)/foto: iwan armanias/parle.

Komisi VIII Dorong Kemenhub Tambah Maskapai Haji

Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Perhubungan agar memberi kesempatan kepada maskapai penerbangan lain untuk ikut serta dalam pelayanan transportasi udara bagi jemaah haji tahun 1435 H/2014 M, dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan penerbangan jemaah haji. Hal tersebut menjadi salah satu butir kesimpulan dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri Perhubungan, E.E Mangindaan, Senin (17/2).

Menurut Ketua Komisi VIII, Ida Fauziyah hal tersebut untuk menciptakan kompetisi yang sehat atau fair bagi semua penerbangan. Pasalnya belakangan muncul kecurigaan adanya monopoli dalam pemilihan penerbangan haji. Seba-

gaimana diketahui selama ini penerbangan dalam perjalanan ibadah haji hanya menggunakan dua maskapai, Garuda Indonesia dan Saudi Arabia Airlines.

“Untuk mengantisipasi adanya monopoli dalam penerbangan haji, kami mendorong Kementerian Perhubungan untuk memberi kesempatan maskapai penerbangan lain untuk ikut serta dalam pelayanan transportasi udara haji. Dengan adanya kompetisi yang fair diantara maskapai penerbangan, juga akan menciptakan kompetisi dalam memberikan harga rendah namun dengan pelayanan yang maksimal untuk jemaah,” ujar Ida Fauziyah.



Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah berjabat tangan dengan Menhub. E.E. Mangindaan.

Ditambahkan anggota Komisi VIII lainnya, Adang Ruchiatna, saat melakukan pengawasan di Tanah Suci tidak jarang ia menemui maskapai penerbangan lain yang mengangkut jemaah haji dari negara lain. Padahal di Indonesia sendiri maskapai tersebut konon tidak lulus dalam test atau uji kelaikan penerbangan haji.

“Ada beberapa maskapai lain yang saya temui di Saudi Arabia, salah satunya Air Asia bisa mengangkut jemaah haji dari negara lain, tetapi katanya maskapai tersebut tidak

lulus dalam test kelaikan di Indonesia, kenapa ini bisa terjadi? Bahkan saat itu juga mereka mengaku bahwa test atau proses tender untuk penerbangan haji Indonesia hanya basa-basi, karena ujung-ujungnya ya hanya dua maskapai itu saja yang lolos. Saya tidak ingin hal tersebut terulang lagi,” tegas Adang.

Bahkan dilanjutkan Adang, ia baru akan mengapresiasi keberhasilan Kementerian Perhubungan jika sudah bisa menambah maskapai penerbangan haji menjadi lebih dari dua. Tentunya hal tersebut tetap harus mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan dalam penerbangan.

Menjawab hal tersebut, Menteri Perhubungan, E.E Mangindaan mengatakan bahwa penetapan peserta tender bagi perusahaan penerbangan yang akan ikut melayani penerbangan haji dalam Undang-undang ditentukan ada di bawah Kementerian Agama. Namun persyaratan teknis dan administrasi berupa test kelaikan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan.

“Kami melakukan test persyaratan secara terbuka dan tidak ada monopoli di dalamnya, namun keputusan akhirnya memang Kementerian Agama yang menentukan maskapai penerbangan yang akan digunakan sebagai angkutan haji. Dengan adanya dorongan dari Komisi VIII, kami akan kembali bahas hal ini dengan Kementerian Agama,” jawab Mangindaan. (Ayu)/foto: iwan armanias/parle/andri*

Kontrak Transportasi Udara Untuk Haji Sebaiknya Gunakan Kurs Real



Anggota Komisi VIII DPR Raihan Iskandar.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Raihan Iskandar berharap agar Kementerian Perhubungan menggunakan mata uang Real dalam mengadakan kontrak atau perjanjian kerja sama bisnis dengan maskapai penerbangan. Hal tersebut mengingat nilai tukar rupiah dengan Real selama ini terbilang lebih stabil, dibanding nilai tukar rupiah de-

ngan dolar. Hal tersebut disampaikan Raihan saat rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan, Senin (17/2).

“Kita harus cari jalan agar kontrak kita dengan maskapai penerbangan menggunakan Real, karena bisa dikatakan nilai tukar rupiah dengan real selama ini relatif stabil dibanding dengan dolar. Sekitar Tahun 1997-1998 nilai tukar rupiah dengan real hanya berkisar empat ribu, saat ini hanya tiga ribu dua ratus rupiah. Sementara dolar jauh di atas itu. Melihat hal tersebut, bagaimana jika kontrak kita dengan maskapai menggunakan real saja yang perbedaannya tidak terlalu signifikan,” kata Raihan.

Disamping itu menurut Raihan, selama ini Kementerian agama pun dalam melakukan kontrak atau tender dengan perusahaan lain, seperti catering, dan pemondokan juga menggunakan mata uang real. Jika kontrak

Indonesia dengan maskapai penerbangan haji menggunakan kurs real, maka ia yakin akan dapat menekan biaya pengeluaran untuk transportasi udara perjalanan ibadah haji.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan, E.E Mangindaan mengatakan bahwa ia akan mengupayakan hal tersebut. Namun ia sangat pesimis hal tersebut bisa terwujud. Pasalnya tarif semua *airlines* (maskapai) saat ini menggunakan mata uang dolar.

“Kalau kita paksakan, khawatir maskapai penerbangan tidak akan mau, karena hal itu menyangkut juga dengan biaya perawatan pesawat yang kesemuanya menggunakan mata uang dolar, seperti pembelian *spare part* pesawat yang menggunakan mata uang dolar sebagai *international kurs*,” jelas Menhub. (Ayu)/foto: iwan armanias/parle/andri*



Wakil Bicara



Anggota Komisi VIII Anwar Idris

Sesuai standard *Civil Aviation Safety Regulation (CASR)* pemeriksaan pesawat haji tiga minggu sebelum keberangkatan. Tetapi sesaat sebelum berangkat pun harus tetap dilakukan pemeriksaan ulang secara paripurna atas kondisi pesawat haji. Keselamatan adalah yang utama, tapi *OTP (On Time Performance)* juga harus ditingkatkan.



Anggota Komisi X Popong Otje Djundjuran

“Urusan pendidikan tidak boleh berhenti akibat bencana alam. Mungkin yang lain boleh berhenti, tapi pendidikan, **TIDAK**. Karena ini menyangkut masa depan bangsa. Tidak ada alasan untuk memberhentikan pendidikan, apalagi alasannya cuma karena gedungnya rusak. Segera buat sekolah darurat jika ada bencana. Pemerintah harus memastikan proses belajar mengajar tidak terganggu akibat bencana alam.”

“Ke depan dengan **Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)** tidak ada lagi perbedaan status sosial ekonomi seseorang dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. **SJSN** akan mendorong Pemerintah membenahi fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau masih seperti dulu pembiayaan kesehatan keluar dari kantong sendiri akan membawa ketidakadilan.”



Anggota Komisi IX Surya Chandra Surapaty



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

Kisruh antara segelintir penghuni dengan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) dan pengelola ITC Mangga Dua sudah terjadi cukup lama. Penghuninya pun sudah melaporkan hal ini kepada Pimpinan DPR RI. Menyikapi hal ini, DPR akan tetap berpegang pada undang-undang dalam proses ini.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menerima pengaduan Haida Sutari, yang mengklaim sebagai Ketua PPRS I A, ITC Mangga Dua. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat BAKN, Gedung Nusantara II, Senin (17/02).

“Saya sudah mengetahui semua

Kisruh Apartemen, DPR Tetap Berpegang Pada Undang-undang

informasi dan duduk permasalahannya sebelum pertemuan ini. Yang saya perlu tekankan adalah kebenaran itu harus berpijak pada undang-undang. Kebenaran itu tidak bisa dipaksakan, kebenaran itu harus ditegakkan itu prinsip dasar keadilan. Harusnya kita kembali kepada kebenaran, kebenaran itu undang-undang,” jelas Marzuki.

Semula pertemuan ini dijadwalkan hanya untuk mendengar pengaduan dari Haida Sutari, namun ternyata juga dihadiri oleh ratusan penghuni rumah susun lain di wilayah Jakarta. Penghuni rusun ini didampingi oleh pakar komunikasi Effendy Ghazali, Saurip Kadi, dan pengacara Palmer Situmorang.

Marzuki sempat mempertanyakan undangan yang hadir, termasuk ratusan penghuni rusun di wilayah lain yang hadir memenuhi ruangan, padahal tak terkait agenda rapat.

“Sesuai jadwal yang saya terima, pertemuan hari ini hanya bersama pe-

milik kios di ITC Mangga Dua dengan pengelola. Kenapa ini ada dari penghuni rusun lainnya,” tanya Marzuki.

Namun demikian, Politisi Demokrat ini tetap berjanji menyelesaikan konflik internal rusun ini dengan seadil-adilnya. Ia juga berjanji akan memanggil Gubernur Jakarta, agar segera mendapat penyelesaian masalah ini.

“Semua pihak terkait masalah kisruh penghuni rusun akan dipanggil oleh Dewan sehingga diperoleh informasi yang jelas. Termasuk, Gubernur DKI Jakarta selaku pembina rusun untuk menuntaskan persoalan itu. Kita akan cari solusinya,” janjinya.

Kabareskrim Mabes Polri Komjen Suhardi Alius yang turut hadir dalam pertemuan ini menjelaskan, pihaknya telah berupaya melakukan pengamanan di ITC Mangga Dua. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan dari kedua pihak yang berselisih. (ar,sf) foto: iwan armanias/parle.

Pemerintah Harus Berikan Perhatian Kepada Kawasan Timur

Siapa yang tak kenal Kawasan Raja Ampat di Papua Barat? Keindahan alamnya telah menarik wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara untuk mengunjunginya. Namun, walaupun Kawasan Timur memiliki potensi wisata yang cukup tinggi, bahkan telah menyumbang pendapatan negara, perhatian pemerintah pusat kepada Pulau Cenderawasih ini masih kurang.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR Diaz Gwijangge di Ruang Rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, saat rapat kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, Senin (17/02).



Anggota Komisi X DPR Diaz Gwijangge.

“Dari sisi infrastruktur, Kawasan Timur mungkin belum sehebat Kawasan Tengah atau Barat, tetapi untuk potensi lingkungan ataupun potensi

pariwisata, menjadi daya tarik oleh wisatawan mancanegara maupun nusantara. Ini yang mesti diperhatikan oleh Pemerintah Pusat. Mungkin mereka (Pemerintah Daerah Papua Barat) belum bisa merancang atau mempromosikan potensi wisata yang ada, saya kira dari Kementerian terkait ada arahan bagaimana mengembangkannya itu,” jelas Diaz.

Politisi Demokrat ini menambahkan, dengan tidak adanya gunung berapi, cukup mendukung Kawasan Timur untuk menjadi pilihan wisata selain Kawasan Barat Indonesia. Ia menilai, jika terjadi bencana alam terjadi di Kawasan Barat, dapat menghambat pemasukan devisa negara.

“Mungkin selama ini fokus pengembangan wisata selalu di Kawasan Barat, tapi kita coba lihat, di Kawasan Timur itu tidak ada Gunung Berapi. Wilayah Timur masih bisa membantu devisa negara. Pembangunan infrastruktur bisa diarahkan ke Kawasan Timur, dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, tidak terfokus ke Bali atau Kawasan Barat saja. Akibat letusan gunung berapi ini, wisata di sekitar Jawa Tengah, Jawa Timur, maupun Yogyakarta menjadi macet dan terhambat. Ini saya harapkan menjadi perhatian ibu Menteri dan jajarannya.” harap Diaz.

Politisi asal Dapil Papua ini menilai, jika selama ini alasan membangun Kawasan Timur dikarenakan sulitnya akses, justru ini harus segera dimulai. Sehingga kedepannya, potensi wisata Kawasan Timur semakin dikenal.

“Mungkin ini waktunya sudah habis,

tapi kalau tidak kami sampaikan, akan semakin terlambat. Bukan hanya Papua, wilayah seperti Maluku itu memiliki potensi wisata. Kalau selama ini akses ke sana kurang dan sarana prasarana kurang, berarti kita harus mulai dari sekarang dong? Ini harus didorong di berbagai *leading sector*. Saya kira tidak rugi jika Pemerintah membangun Kawasan Timur Indonesia, karena Papua dan Papua Barat menyumbang cukup besar bagi devisa negara, baik pariwisata dan sumber daya energi,” tambah Diaz.

la selalu berharap, dengan adanya perhatian dari Pemerintah, turut membangkitkan kegiatan perekonomian di Kawasan Timur. Hal ini tidak sebanding dengan apa yang telah diberikan terhadap pendapatan negara.

“Potensi pariwisata di Papua maupun Papua Barat sangat luar biasa. Kenapa tidak kita garap secara konti-

nyu, supaya ada bukti pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak terkesan hanya di Kawasan Barat saja. Sehingga, ekonomi bukan hanya meningkat di Kawasan Barat saja, sedangkan ekonomi Kawasan Timur masih begini-begini saja. Kan kasihan, padahal sumbangsih untuk APBN cukup tinggi. Pembangunan infrastruktur untuk menarik wisnus maupun wisman belum digarap,” tutur Diaz.

la juga mengatakan pemerataan pembangunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga jika suatu daerah terkena bencana alam, dapat dialihkan ke wilayah lain.

“Kedepannya, Kawasan Timur harus diutamakan. Sehingga, jika di pulau Jawa ada bencana, wisatawan bisa dialihkan ke Kawasan Timur, sehingga bencana ini tidak mempengaruhi pendapatan negara,” harap Diaz. (sf) foto:hr/parle/odjie.

Komisi X Apresiasi Capaian Jumlah Wisatawan

Komisi X memberikan apresiasi kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atas pencapaian kinerja tahun 2013, dalam hal pencapaian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 8,8 juta atau meningkat sebesar 9,42% dari tahun 2012.

Hal ini menjadi salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi X dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu di Ruang Rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Senin (17/02).

Selain itu, Komisi X juga mendorong Kemenparekraf untuk tetap meningkatkan kinerjanya dalam mencapai target pada tahun 2014, antara lain jumlah wisman 9,5 juta wisnus 251,7 juta dan kontribusi PDB ekonomi kreatif sebesar Rp 693 triliun.

“Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf RI untuk mengambil langkah-langkah strategis agar pencapaian kunjungan wisatawan nusantara yang belum mencapai target pada tahun 2013 dapat ditingkatkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2014,” jelas Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bachri.

Dalam paparannya, Mari Elka Pangestu menyatakan bahwa jumlah kunjungan wisman pada periode Januari hingga Desember 2013 mencapai 8,8 juta, atau mengalami peningkatan sebesar 9,42% dibanding 2012. Sedangkan,



Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri saat memimpin rapat.

untuk wisatawan nusantara mencapai 248 juta perjalanan, dengan nilai mencapai Rp 176 triliun.

“Target wisman pada 2014 mencapai angka 9,2 sampai 9,4 juta, dengan asumsi pertumbuhan 6-8%. Untuk wisnus, target 250-252 juta perjalanan, dengan asumsi pertumbuhan 1-1,7%,” jelas Mari Elka.

Dalam kesempatan ini, Komisi X juga mendukung fokus dan strategi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Kemenparekraf RI pada tahun 2014 khususnya yang berkaitan dengan peningkatan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk aparatur di daerah, diversifikasi destinasi, dan harmonisasi kebijakan antara sektor, pusat dan daerah. (sf) foto:iw/parle/odjie.

Komisi VIII Akan Sinkronkan Peningkatan Anggaran dan Kualitas PTAI

Panitia Kerja Perguruan Tinggi Agama Islam (Panja PTAI) Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kalimantan Selatan memantau peningkatan anggaran bagi peningkatan kualitas serta *output* Perguruan Tinggi Agama Islam, sekaligus mensinkronkan anggaran yang dialokasikan untuk perguruan tinggi yang berada dibawah Kementerian Agama RI. Sejumlah masalah menjadi perhatian dalam kegiatan yang merupakan bagian dari fungsi pengawasan dewan.

“Tim Kunker Komisi VIII DPR ingin tahu bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Kanwil Departemen Agama Prov. Kalsel terkait masalah anggaran,” kata Ketua Tim Panja Ida Fauziyah dalam pertemuan dengan Kanwil Agama, Rektor (IAIN Antasari Banjarmasin) dan PTAIS Prov. Kalsel, Kamis pekan lalu.

Lebih lanjut Ida Fauziyah yang juga Ketua Komisi VIII DPR menyatakan bahwa, untuk meningkatkan status Perguruan Tinggi Agama Islam perlu



Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziyah.

memenuhi persyaratan administratif dan akademis, misalnya dari STAIN menjadi IAIN dan dari IAIN menjadi UIN. Peningkatan status ini berdasarkan pengalaman, berdampak pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi Agama Islam dan juga menghasilkan *output* yang berkualitas.

Disamping itu, target dari Panja ini antara lain mengharapkan dengan naiknya anggaran Perguruan Tinggi Agama Islam, akan meningkat pula

standar dan akreditasinya dan akhirnya tercapainya proporsionalitas anggaran. Panja DPR juga akan menginventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang menghambat pengembangan dan kemajuan Perguruan Tinggi Agama Islam dan juga akan mempertimbangkan penyusunan RUU tentang Perguruan Tinggi Agama Islam.

Dalam kesempatan itu, Pimpinan Komisi VIII menemukan masalah yang berkaitan dengan PTAI. Yaitu kecenderungan rendahnya kualitas pendidikan di PTAI dan adanya disparitas anggaran. Anggaran perguruan tinggi yang berada dibawah naungan Kemenag RI tertinggal jauh dibanding anggaran PT dibawah Kemendikbud RI ” kata Ida.

Untuk itu Ida menyatakan, bahwa melalui pembentukan Panja PTAI ini, Komisi VIII DPR berharap dapat mengupayakan peningkatan kualitas PTAI dengan mensinkronkan anggaran yang dialokasikan untuk PT yang berada di bawah Kemenag RI dan yang berada dibawah Kemendikbud. (hr), foto : eka hindra/parle/hr.

Komisi IX Dorong BPJS Tenaga Kerja Pidanakan Perusahaan Curang

Anggota Komisi IX DPR RI, Ansory Siregar mendorong agar BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan melakukan perubahan total. Pasalnya, saat masih bernama Jamsostek, ia menilai kinerja lembaga ini sangat amburadul. Hal tersebut diungkapkan Ansory saat kunjungan spesifik Komisi IX ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi-Maluku beberapa hari yang lalu.

“Sebelum bernama BPJS atau saat masih bernama Jamsostek, kinerjanya amburadul. Laporan perusahaan jumlah tenaga kerja lima ribu, namun yang didaftarkan hanya empat ratus. Belum lagi prosedur pembuatan dan klaim Jamsostek yang sangat sulit. Ini seperti lingkaran setan,” ungkap Ansory.

Oleh karena itu, Ansory berharap agar BPJS Ketenaga-



Anggota Komisi IX DPR Ansory Siregar.

kerjaan saat ini tidak seperti Jamsostek. Agar menghindari kecurangan dari perusahaan yang hanya mendaftarkan sebagian kecil jumlah dari karyawannya, ia berharap agar BPJS bekerja sama dengan berbagai serikat pekerja atau serikat buruh. Dengan demikian akan mengantisipasi terjadinya manipulasi jumlah karyawan.

Ditambahkan Indra, anggota Komisi IX lainnya, DPR akan mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk mengusulkan kepada Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang curang dalam mendaftarkan karyawannya. Bahkan jika memang dibutuhkan, DPR akan mendorong BPJS untuk mempidanakan perusahaan yang curang tersebut lewat jalur hukum. Hal tersebut semata-mata untuk memberikan perlindungan kepada para karyawan atau buruh. (Ayu), foto : eka hindra/parle/ayu*

Masalah Haji Sebaiknya Diatur Oleh Badan Khusus

Masalah haji sebaiknya diatur oleh satu badan/lembaga khusus, dipisahkan antara operator dan regulator. “Kita ingin memposisikan Kemenag dalam porsi yang tepat sebagai institusi penjaga moral bangsa. Sedangkan masalah haji, karena persoalan manajemen biarlah diurus oleh satu institusi yang lebih fokus, bentuknya Badan Layanan Umum (BLU),” ungkap anggota Komisi VIII DPR TB H. Ace Hasan Syadzily, kepada Parle di Jakarta.

Terkait pembentukan lembaga baru tersebut, kata Ace, Komisi VIII sedang merevisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji yang arahnya memang kesana. Hanya saja masih didiskusikan dengan Panja pemerintah terkait kelembagaannya seperti apa, “Apakah lembaga tersebut dibawah Kemenag,

atau dibawah Presiden. Ada kecenderungan kita menginginkan dibawah Presiden, karena yang terkait dengan haji itu bukan hanya Kemenag, tetapi juga terkait dengan Kementerian Perhubungan, Kemenlu, Kemenkumham, juga terkait dengan Kementerian Keuangan,” jelas dia.

Kendati demikian, politisi dari Dapil Pandeglang, Banten ini mengatakan, supaya punya kewibawaan secara institusi maka *leading sector*nya adalah Kemenag. Masalah ini, katanya, masih didiskusikan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Haji. Badan khusus nantinya mengurus penyelenggaraan Haji dan Umroh.

Ia mengaku memiliki beberapa data dana haji tahun kemarin Rp 2,3 triliun



Anggota Komisi VIII DPR TB H. Ace Hasan Syadzily.

sebagai dana imbal hasil digunakan untuk penambahan selisih pemondokan, Ada *save guarding*, biaya kurs dan biaya lainnya. “Hanya saja ini belum memuaskan harapan masyarakat. Kita akan terus mendorong Kementerian Agama bisa mengoptimalkan dana tersebut untuk kepentingan pelayanan ibadah haji,” pungkas Ace Hasan. (mp), foto : andri/parle/hr.

DPR : RUU Pertanahan Bukan Pengganti UU Pokok Agraria

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang sedang digodok bukan pengganti UU Pokok Agraria (UUPA) 1960. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja, saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), antara Komisi II DPR dengan sejumlah Pakar Pertanahan, di Gedung DPR, Kamis (13/2).



Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja.

Komisi II DPR meminta masukan pemikiran para pakar sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Pertanahan yang dikirim pemerintah.

Hakam Naja mengatakan RUU Pertanahan yang sedang dibahas DPR merupakan pelengkap dari UUPA 1960 yang sudah berlaku. Dia juga menampik banyak persepsi selama ini yang mengatakan kalau RUU inisiatif dewan ini sebagai pengganti UUPA, khususnya dalam konteks reforma agraria. “RUU Pertanahan ini tidak hendak mengganti UUPA, tapi hanya melengkapi,” katanya.

Sebelumnya, dalam daftar inventaris masalah (DIM) RUU Pertanahan, salah satu hal yang krusial yang memerlukan pembahasan secara mendalam antara pemerintah dan Komisi II DPR adalah mengenai kepastian dari RUU ini. Apakah sebagai pengganti UUPA atau mengubah UUPA. Pasalnya, beberapa substansi di dalam UUPA juga perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, pemerintah dan negara dibidang pertanahan.

Di tempat yang sama, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin menilai, saat ini konsep kepemilikan tanah tidak mencerminkan keadilan. Banyak masyarakat yang tak memiliki lahan pertanian. Sementara, perusahaan menganggangi jutaan hektar lahan. Untuk itu, dengan

adanya UU Pertanahan ini, status kepemilikan lahan harus ditata ulang.

Menurut dia, orang desa sudah terlalu miskin, sementara, industri di desa tidak berkembang karena pasar di pedesaan tidak tercipta. Buruh tani juga tidak produktif karena tak bisa mengakses lahan pertanian. Hal itu hanya bisa diselesaikan dengan reformasi agraria. “HGU harus diprioritaskan bagi petani,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Sarikat Petani Indonesia (SPI) Henri Saragih

mendukung usulan DPR yang memosisikan RUU Pertanahan sebagai penyempurna UUPA yang ada. Namun, kata dia, RUU Pertanahan ini harus diorientasikan untuk mengatasi konflik agraria yang tidak kunjung selesai. Menurut dia, bagaimana negara Indonesia mau maju kalau konflik agraria masih sangat kuat. Untuk itu, dia berharap agar draf RUU yang sedang digodok di Panja RUU Pertanahan tersebut sesuai dengan semangat reformasi agraria. “Posisi RUU ini sangat strategis,” ujarnya.

Henri mengatakan, semangat dari RUU Pertanahan adalah menjabarkan UU Pokok Agraria 1960. Untuk itu, dia berharap regulasi ini bisa menyelesaikan ketidakadilan dalam kepemilikan tanah. Ia mengatakan, kalau harapan tersebut terealisasi, konflik agraria tidak akan terjadi. “Akan ada keadilan. Orang yang tidak punya tanah dapat lahan. Sedangkan yang terlampaui banyak akan dikurangi,” ujarnya. (nt)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi VIII Dorong Alumni PTAI Kompetitif

Komisi VIII DPR RI saat ini tengah mengaktifkan Panitia Kerja Perguruan Tinggi Agama Islam (Panja PTAI). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas PTAI, meningkatkan kualitas output dari PTAI sehingga alumninya kompetitif di dunia kerja. Selain itu meningkatkan status PTAI yang memenuhi persyaratan administratif dan akademis, dan meningkatkan kualitas PTAI, bahkan bisa berstandar internasional.

“Ada banyak hal yang harus dipahami tentang peta pendidikan Islam di Indonesia, terutama terkait dengan makna pendidikan Islam itu sendiri, jenis kelembagaan, orientasi pengembangan, partisipasi masyarakat, dan masih lagi lainnya,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sayed Fuad Zakaria (F-PG) selaku Ketua Tim Panja PTAI saat ditemui Parle, Kamis (13/2/2014).

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, dalam konteks pendidikan Islam mengalami pemaknaan yang dinamis dari waktu ke waktu. Pendidikan adalah usaha sadar dan sistemik untuk mengembangkan dan mengoptimalkan seluruh potensi individu dan masyarakat secara total agar maju dan fungsional. “Pendidikan diyakini merupakan kunci untuk kemajuan bangsa agar bisa lebih unggul dengan bangsa-bangsa lain dalam konteks persaingan

global,” jelasnya.

Dalam pembukaan UUD 1945, lanjutnya, bahwa salah satu tujuan nasional pembangunan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satu lembaga pendidikan berperan tersebut adalah perguruan tinggi, termasuk di dalam PTAI.

Menurutnya, selama ini PTAI kualitas pendidikannya masih rendah, diantara penyebabnya adalah minimnya anggaran pendidikan. Alokasi anggaran untuk perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian Agama rendah, sedangkan alokasi anggaran untuk perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cukup besar.

Hal ini berdampak pada sarana prasarana yang kurang lengkap, kualitas dan kreativitas dosen yang rendah, struktur kelembagaan yang tidak lengkap, kurikulum tidak berkembang, dan minimnya hasil penelitian. “Sebagai tindak lanjutnya *out put* dari PTAI juga rendah, sehingga alumninya kurang kompetitif di dunia kerja,” tegasnya.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sayed Fuad Zakaria.

Selain itu, lanjutnya, masih sering berubah-ubahnya program yang dibuat penyelenggara pendidikan mulai Kemendikbud, dinas, perguruan tinggi, sekolah hingga lembaga pendidikan informal dan non formal. Hal itu terkait penggunaan anggaran 20% termasuk cara membagi alokasi anggaran antar lembaga, mendistribusikan dan menggunakannya baik oleh Kemendikbud dengan Kemenag menjadi salah satu sebab permasalahan pendidikan di Indonesia.

Melihat berbagai kepentingan pengembangan kelembagaan dan akademik, pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan sarana dan prasarana di PTAI, maka diperlukan kiranya keberpihakan DPR RI dan pemerintah. “Intinya, DPR berharap perlunya anggaran sektor perguruan tinggi Kementerian Agama bisa ditingkatkan,” ungkap Sayed menambahkan. (iw)/foto:iwan armanias/parle.

DPR Dukung KPK Usut Dana Penyelenggaraan Haji



Anggota Komisi VIII DPR TB H. Ace Hasan Syadzily bersama Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Parni Hadi, dan Pengamat Haji, M Subarkah.

DPR mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dana penyelenggaraan haji yang dikelola Kementerian Agama. DPR berharap, penelusuran 'lalu-lintas' dana haji tersebut mampu mengungkap tabir rahasia dana haji yang selama ini tidak bisa diketahui publik.

"Syukur KPK masuk ke urusan dana haji. Pemanggilan sejumlah anggota dan pimpinan Komisi VIII DPR oleh KPK merupakan cara terbaik untuk mengetahui mekanisme dan substansi dari UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji," kata Anggota Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, dalam diskusi yang digelar di Pressroom DPR, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/2). Diskusi ini juga dihadiri, Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Parni Hadi, dan Pengamat Haji, M Subarkah, sebagai pembicara.

Menurut Ace Hasan, awal tahun 2014 merupakan momentum terbaik bagi KPK melakukan penelusuran karena bertepatan dengan momen Pemilu. "KPK kita dorong untuk menyidikinya secara detail dan umumkan ke rakyat karena rakyat berhak tahu tentang dana haji yang disebut-sebut telah mencapai Rp 67 triliun itu," ujarnya.

Politisi dari Partai Golkar itu mengungkapkan, DPR telah berulang kali meminta Kementerian Agama untuk mengungkap dana tersebut secara transparan. "Jawaban Menteri Agama tetap saja tidak bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Ngambang. Padahal publik punya hak untuk mengetahuinya setiap saat," imbuhnya.

Menurut Ace Hasan, saat ini tercatat 2.904.000 orang calon jamaah haji yang masuk dalam daftar tunggu. Berdasarkan laporan Menteri Agama pada November 2013 lalu, kata Ace, setoran awal calon jamaah haji mengalami kenaikan

an dari Rp 25 juta menjadi Rp 30 juta.

"Jika makin banyak setoran, maka nilai investasi makin besar. Tetapi persoalannya belum ada laporan pasti mengenai pengelolaan dana tersebut," katanya.

Pihaknya berharap jangan ada pihak yang mencari untung dalam mengelola dana haji tersebut. Masih berdasarkan laporan Menag kepada Komisi VIII DPR, Ace Hasan mengungkapkan bahwa uang yang dihimpun dari setoran calon jamaah haji sudah mencapai Rp56,8 triliun. Dana tersebut disimpan di bank syariah, bank konvensional dan suku bunga. "Kami mendorong agar Menteri Agama terbuka dalam mengelola dana haji," tegasnya.

Lebih lanjut, Ace Hasan mengungkapkan, hasil optimalisasi dana haji tersebut sebesar Rp 2,1 triliun yang dapat digunakan untuk biaya langsung kepada jamaah.

Ace Hasan juga mengatakan, meski mulai ada itikad untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun, Komisi VIII DPR tetap mendorong pemisahan antara regulator dan operator. "Persoalannya, Kementerian Agama belum sepakat tentang pemisahan regulator dan operator penyelenggaraan ibadah haji," katanya.

Ace juga mengungkapkan kekecewaannya kepada Kementerian Agama karena untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2014 hingga saat ini belum dilakukan penandatanganan dokumen kontrak terkait pemondokan dan transportasi. Padahal Komisi VIII telah menyetujui untuk membayar 50 persen lebih awal dari total anggaran yang akan digunakan.

Sementara itu, Parni Hadi dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) mengusulkan agar penyelenggaraan ibadah haji harus dipisahkan dari Kementerian Agama. Pemisahan itu dilakukan dengan membentuk badan khusus yang bertanggungjawab kepada Presiden. Menurutnya, Kementerian Agama sebaiknya hanya berperan sebagai regulator dan tidak merangkap sebagai operator.

Pengamat Haji, M Subarkah mengungkapkan, persoalan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia memang sangat pelik karena menyangkut politik dan ekonomi. Subarkah juga menyatakan sepakat bahwa dana haji harus dikelola secara transparan. Persoalannya, kata Subarkah, dana haji kurang dipublikasikan kepada masyarakat melalui website Kementerian Agama. (nt/sc)/foto: iwan armanias/parle/andri*

Pelatihan Guru dan Distribusi Buku Kurikulum 2013 Belum Merata

Direncanakan, Juli 2014 ini, Kurikulum 2013 dapat diterapkan di seluruh sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah tingkat menengah. Namun, hingga bulan kedua di 2014 ini, masih ada beberapa masalah terkait dengan persiapan Kurikulum 2013 ini.

Di Provinsi Kepulauan Riau sendiri, kendala dan permasalahan yang dihadapi diantaranya belum meratanya sekolah untuk melaksanakan Kurikulum 2013 dan belum meratanya penyebaran buku paket pegangan siswa dan guru.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Robert Iwan Loriaux yang didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Yatim Mustafa, saat menerima kunjungan spesifik Komisi X DPR RI di Graha Kepri, Batam, Rabu (12/02).



Anggota Komisi X Herlini Amran.

“Dari 6.000 guru sasaran, baru 65 guru yang mendapat pelatihan menjadi guru inti (*master teacher*). Selain itu, belum meratanya pendistribusian buku, upaya yang dilakukan dengan menggandakan buku pegangan siswa dan guru kepada sekolah yang belum menerima,” jelas Robert.

Menyikapi hal ini, Anggota Komisi X Herlini Amran menilai bahwa kondisi di lapangan belum siap menerapkan Kurikulum 2013. Masih diperlukan pela-

tihan dan distribusi buku yang harus disikapi secara serius.

“Sebenarnya, Kurikulum 2013 itu sudah disiapkan dan diatur oleh pemerintah. Namun, ternyata kondisi di lapangan belum siap. Masih membutuhkan pelatihan guru dan distribusi buku. Dari hasil pengamatan di lapangan, sebenarnya guru-guru belum siap untuk menjalankan Kurikulum 2013 ini. Tapi, karena ini merupakan program dari Kemendikbud yang mau tidak mau harus dijalankan, maka mereka mau tidak mau juga harus siap,” jelas Herlini.

Kondisi di lapangan yang belum siap, tambah Politisi F-PKS ini, menjadi tantangan untuk Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, untuk dapat menyikapinya. Khawatir, karut marutnya Kurikulum ini berdampak pada proses belajar mengajar.

“Ini tantangan besar untuk pemerintah, jangan sampai penerapan Kurikulum 2013 ini terkesan dipaksakan dan menyebabkan dampak pada proses belajar mengajar. Guru adalah ujung tombak dari program-program yang ada di Pemerintah Pusat. Kalau gurunya tidak siap, bagaimana dengan muridnya,” tambah Politisi asal Dapil Kepulauan Riau ini.

Ia menyarankan, jika Kurikulum 2013 ini belum siap, sebaiknya menggunakan Kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP. Sembari menggunakan kurikulum KTSP, dapat dipersiapkan Kurikulum 2013.

“Kalau belum siap, lanjutkan program yang lama saja dulu, sambil disiapkan dulu pelatihan untuk gurugurunya. Kalau sudah siap, baru kemudian kita laksanakan. Padahal, guru mengaku Kurikulum KTSP sudah *enjoy* dijalani, ini malah berubah lagi, sehingga membuat bingung guru-guru yang ada. Akibatnya, di lapangan ditemui banyak kendala,” tambahnya.

Ia berharap, Kemendikbud tidak memaksakan implementasi Kurikulum 2013. Dan dapat melihat kondisi di la-

pangan, sehingga tidak memaksakan pelaksanaannya.

“Kita berharap Kementerian turun ke lapangan, jangan hanya terima laporan saja. Jangan *keukeuh* (memaksakan) dengan pandangannya, terima masukan-masukan sampai ke daerah-daerah. Dan memperhatikan kondisi geografis di lapangan. Apalagi kepulauan yang cukup berbeda dengan daerah lain,” jelas Herlini.



Anggota Komisi X Dedi Suwandi Gumelar.

Sementara itu, Anggota Komisi X Dedi Suwandi Gumelar menyatakan, sebenarnya tidak ada masalah jika Kurikulum 2013 ini dilaksanakan, namun dengan catatan semuanya sudah dipersiapkan secara matang.

“Kalau kita lihat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini terlalu *ngebet* (sangat berkeinginan) untuk memberlakukan Kurikulum 2013. Silahkan saja Kemendikbud memberlakukan ini, jika semuanya sudah siap, termasuk guru dan bukunya. Tapi sudah kami dengar dari pelaku pendidikan di Kepri, mereka belum siap,” jelas Dedi.

Politisi F-PDI Perjuangan ini tidak ingin guru-guru menjadi disalahkan karena akibat kurangnya persiapan dan pelatihan. Perlu persiapan secara menyeluruh agar guru siap melaksanakan Kurikulum 2013.

“Saya tidak ingin guru menjadi

kambing hitam. Guru disalahkan karena dikira tidak bagus, akhirnya murid menjadi korban. Untuk itu, siapkan waktu 1-2 tahun untuk mempersiapkan

guru secara menyeluruh. Karena dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG), dari ribuan guru yang disertifikasi, ternyata yang layak secara substansi hanya

30%, lalu bagaimana nanti dengan kurikulum baru,” khawatir Politisi yang akrab dipanggil Miing ini. (sf)/foto: iwan armanias/parle/sofyan*

Kisruh Wawako Surabaya, DPR Panggil Pihak Terkait

Pengangkatan Wakil Walikota (Wawako) Surabaya Wisnu Sakti Buana cacat hukum. Inilah yang memicu konflik di pemerintahan Kota Surabaya, hingga memunculkan wacana mundurnya Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso usai menerima Walikota Surabaya Tri Rismaharini di ruang kerjanya, Kamis (20/2), menegaskan, bukti surat yang diterima dirinya langsung dari Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Walikota Surabaya, memperlihatkan ada kesalahan prosedur dan substansi yang dilakukan DPRD Kota Surabaya. Untuk itu, Priyo menyarankan agar Mendagri menganulir pengangkatan Wakil Walikota tersebut.

“Intinya menurut Panlih cacat hukum. Kalau memang benar Mendagri jangan ragu-ragu untuk mengoreksi. Menurut temuan Panlih yang sah diteken oleh ketua, sekretaris, dan wakil ketua, pemilihan Wakil Walikota Surabaya cacat prosedur dan cacat substansi,” ungkap Priyo. Bila persoalannya pada prosedur, sebaiknya ada pemilihan ulang agar sesuai hukum. Persoalan orang yang sama yang diajukan menjadi Wakil Walikota Surabaya, itu tidak masalah.

Risma sendiri menemui Priyo untuk meminta solusi Pimpinan DPR RI atas penyelesaian konflik yang mendera pemerintahannya. Untuk itu, pihaknya segera mengundang Panlih DPRD Kota Surabaya, Kemendagri, dan Komisi II DPR untuk menyelesaikan kisruh di pemerintahan Kota Surabaya.

“Saya membantu sebagai Pimpinan DPR RI untuk ikut mencari jalan keluar. Besok Panlih kita undang dan Komisi II



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso saat menerima Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

juga Mendagri diminta untuk merespon supaya tidak berlarut-larut,” jelas Priyo.

Sementara menanggapi wacana mundur Risma dari jabatannya, secara pribadi ia menyarankan agar Walikota yang banyak meraih penghargaan itu, tidak mundur. Risma dinilai Priyo sangat baik.

“Beliau orang yang sangat tidak suka berpolitik praktis. Yang disampaikan Risma apa adanya dan jujur. Saran pribadi saya,, sebaiknya jangan mundur karena persoalan-persoalan yang dihadapinya itu. Banyak orang

bersimpati pada dirinya,” aku Priyo.

Sementara itu, Risma sendiri saat dimintai penegasannya soal isu mundur, tidak menjawab secara lugas. Walikota yang suka blusukan ini banyak diam dan tersenyum. Ketika ditanya kenapa ia sering terlihat menangis menghadapi persoalan ini, Risma mengaku, “Saya menangi anak-anak Surabaya.” Ia merasa tak tega melihat warganya menjadi korban atas konflik ini. Pada bagian lain ia menyebut sudah bertemu dengan Presiden SBY dan juga mendapat saran agar dirinya tidak mundur. (mh) Foto: andri/parle/hr.



Kunjungan BAKN DPR RI dipimpin Sumarjati Arjoso dalam rangka menghimpun masukan Amandemen UU Keuangan Negara di Universitas Udayana (kiri) dan Pertemuan BAKN DPR RI dengan Direksi PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam rangka klarifikasi terhadap LHP BPK RI (kanan), Bali (21/2) Foto: Rizka/Parle.



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Pansus RUU Standardisasi Penilaian Kesesuaian (SPK) meninjau Latrade Industrial Park Tanjung Uncang, Batam dipimpin oleh Ketua Pansus RUU SPK Ferrari Romawi, Rabu (19/2) Foto: Sugeng/Parle.



Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin memimpin Rapat Kerja dengan Menhan, Menkeu, Menperin, Meneg BUMN, dan Meneg PPN/Kepala Bappenas di Ruang Rapat Komisi I membahas rencana pembuatan kapal selam oleh industri dalam negeri, Senin (17/2) Foto: HR/Parle/andri*.